

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit

2.1.1 Pengertian Audit

Definisi audit menurut Arens et al., (2015) audit merupakan suatu pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi guna menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh pihak yang independen dan berkompeten.

Menurut Agoes & Trisnawati (2017) audit diartikan sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan kritis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, termasuk catatan akuntansi serta bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan definisi yang di atas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara independen oleh pihak yang memiliki kompetensi, dengan tujuan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terkait laporan keuangan, serta memberikan opini secara objektif dan kritis terhadap laporan tersebut.

2.1.2 Jenis Audit

Menurut Yusuf (2011) audit umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga jenis. Pertama, audit atas laporan keuangan dengan tujuan untuk menilai apakah laporan tersebut memuat seluruh informasi kuantitatif yang relevan dan telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, audit kepatuhan dilakukan untuk menilai

apakah entitas yang diaudit telah menjalankan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Ketiga, audit operasional difokuskan pada penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan terhadap seluruh aspek prosedural yang dijalankan.

Menurut Maks et al., (2019) jenis audit dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut pemeriksaan, jenis audit terbagi dalam:

a. Audit Laporan Keuangan

Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk meninjau laporan keuangan guna memastikan bahwa penyajiannya telah mematuhi standar dan ketentuan akuntansi yang berlaku.

b. Audit Operasional

Audit operasional dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap sistem pengendalian internal untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional organisasi

c. Audit Ketaatan

Audit ketaatan bertujuan untuk menilai tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang - undangan, kebijakan, serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah

2. Menurut luas pemeriksaannya, jenis audit terdiri atas:

a. Audit Umum

Audit Umum merupakan upaya peninjauan dan penilaian oleh auditor independen.

b. Audit Khusus

Audit Khusus merupakan pemeriksaan laporan keuangan yang terbatas. (Misalnya, suatu perusahaan ingin melakukan audit divisi keuangan dalam kurun waktu satu tahun terakhir).

2.1.3 Tujuan Audit

Audit memiliki tujuan untuk memastikan apakah ada penyalahgunaan kas dan untuk memberikan pendapat tentang laporan keuangan secara keseluruhan, sesuai dengan standar akuntansi umum Indonesia. Menurut Agoes & Trisnawati (2017) audit juga memiliki tujuan lain yaitu:

1. Tujuan Kelengkapan

Untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dan dimasukkan ke dalam jurnal.

2. Tujuan Ketetapan

Untuk memastikan bahwa transaksi dan saldo perkiraan telah dicatat dengan benar berdasarkan jumlah, perhitungan, dan pengklasifikasi.

3. Tujuan Eksistensi

Untuk memastikan bahwa semua asset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan benar terjadi pada tanggal dan waktu yang disebutkan.

4. Tujuan Penilaian

Untuk memastikan bahwa praktik akuntansi Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia.

5. Tujuan Klasifikasi

Untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dalam jurnal dan dikelompokkan secara akurat sesuai dengan golongan akuratnya.

6. Tujuan Pisah Batas

Untuk memastikan bahwa transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dengan benar dan tepat.

7. Tujuan Pengungkapan

Untuk memastikan bahwa saldo akun dan semua persyaratan pengungkapan yang relevan telah disajikan dan dijelaskan dengan tepat dalam laporan keuangan.

Tujuan – tujuan tersebut menunjukkan bahwa audit tidak hanya berfokus pada angka, melainkan juga pada kebenaran, kelengkapan, dan transparansi informasi keuangan yang disajikan.

Menurut Arens et al., (2014) mengartikan bahwa tujuan *auditing* diartikan sebagai berikut:

“Untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini dapat menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”.

2.2 Audit Internal Pemerintah

2.2.1 Pengertian Audit Internal Pemerintah

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2021) audit internal merupakan suatu aktivitas yang mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lingkungan institusi pemerintah, auditor internal berperan sebagai penyedia layanan bagi pemerintah dengan memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan pemerintahan secara independen. Selain itu, menurut Anis et al., (2014) audit internal merupakan kegiatan yang berfungsi untuk memberikan bimbingan serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu auditor internal pemerintahan adalah Inspektorat.

2.2.2 Tugas Audit Internal Pemerintah

Berdasarkan Standar Audit yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2021) tujuan utama dari audit internal adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan guna mewujudkan prinsip *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut, APIP berperan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi auditor internal pemerintah. Standar Audit ini juga merumuskan tugas APIP dalam upaya mencapai tujuan organisasi, di antaranya:

1. Menyusun, menetapkan, dan mengembangkan kode etik auditor, standar audit, serta pedoman bagi auditor dalam menjalankan kegiatan audit.

2. Mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan memberikan keyakinan yang memadai terkait kepatuhan, efisiensi, efektivitas, dan penghematan dalam pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah.
3. Menyampaikan rekomendasi dan masukan untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu tata kelola dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

2.3 Inspektorat Daerah

2.3.1 Pengertian Inspektorat Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota mendefinisikan bahwa inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Inspektur merupakan pemimpin inspektorat daerah yang memiliki tugas dengan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2.3.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

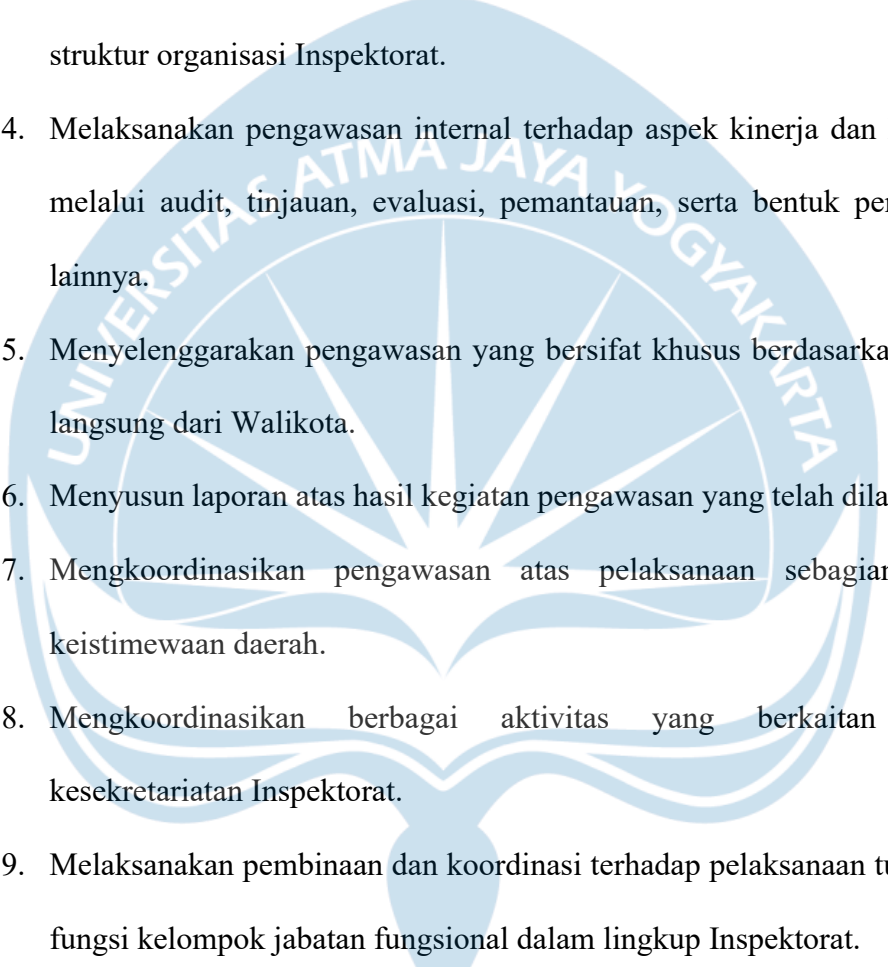
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 3 Ayat (1) memberikan penjelasan bahwa inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengawasi dan membina pelaksanaan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan daerah serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Adapun fungsi inspektorat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 yaitu:

1. Merancang kebijakan teknis dalam lingkup pengawasan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan
2. Melakukan pengawasan internal atas kinerja dan keuangan melalui audit, penelaahan, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya
3. Melaksanakan pengawasan khusus berdasarkan penugasan yang diberikan oleh kepala daerah
4. Menyusun laporan atas hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan
5. Menyelenggarakan kegiatan administratif dalam lingkup inspektorat daerah
6. Menjalankan fungsi tambahan sesuai dengan penugasan dari kepala daerah yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab inspektorat

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat memiliki tugas membantu Walikota, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat juga memiliki fungsi antara lain:

1. Mengkoordinasikan perencanaan program serta kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

- 
2. Melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan serta pengawasan atas urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah.
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan peran dari setiap unsur dalam struktur organisasi Inspektorat.
 4. Melaksanakan pengawasan internal terhadap aspek kinerja dan keuangan melalui audit, tinjauan, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya.
 5. Menyelenggarakan pengawasan yang bersifat khusus berdasarkan mandat langsung dari Walikota.
 6. Menyusun laporan atas hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan.
 7. Mengkoordinasikan pengawasan atas pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan daerah.
 8. Mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kesekretariatan Inspektorat.
 9. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi kelompok jabatan fungsional dalam lingkup Inspektorat.
 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, pengendalian internal, zona integritas, ketatalaksanaan, serta budaya kerja di lingkungan Inspektorat.
 11. Mengatur pelaksanaan pengelolaan arsip dan fasilitas perpustakaan milik Inspektorat.

12. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data serta informasi di lingkungan Inspektorat.
13. Mengkoordinasikan proses tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan pemeriksaan.
14. Mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, evaluasi, serta penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas Inspektorat.
15. Menjalankan tugas tambahan lain sesuai instruksi pimpinan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Inspektorat.

2.4 Kualitas Audit

2.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Fayza et al., (2023) kualitas audit merupakan kemungkinan seorang auditor pemerintah untuk menemukan dan melaporkan suatu penyimpangan yang dilakukan yang terjadi di suatu instansi pemerintah. Kualitas audit yang tinggi dapat dicapai melalui dukungan kompetensi, komitmen organisasi, serta akuntabilitas yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Kualitas audit yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan layak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Kualitas audit dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Bagi auditor, kualitas audit mencerminkan kemampuan untuk mengevaluasi risiko organisasi guna menurunkan potensi litigasi, mengurangi ketidakpuasan terhadap hasil audit, mempertahankan reputasi profesional, serta melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar profesional yang telah ditetapkan. Kemudian menurut DeAngelo (1981) kualitas audit adalah suatu

keadaan seseorang auditor akan mendapatkan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Dalam pelaksanaan audit, auditor harus bertindak sebagai auditor yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan *auditing*.

2.4.2 Indikator Kualitas Audit

Menurut Anjani (2019) indikator kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Keakuratan temuan audit

Auditor bertugas menjamin bahwa hasil pemeriksaan yang disusun benar-benar tepat dan terbebas dari kesalahan, serta dilakukan secara jujur tanpa manipulasi atau rekayasa.

2. Sikap skeptis

Sikap skeptis merupakan sikap waspada, cermat, dan teliti yang wajib dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya, khususnya saat memeriksa dan menilai bukti audit

3. Nilai rekomendasi

Setelah menyelesaikan proses audit, auditor diharapkan menyampaikan rekomendasi yang ditujukan untuk memperbaiki faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan atau penyimpangan.

4. Kejelasan laporan audit

Auditor harus menyusun laporan audit yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak.

5. Manfaat hasil audit

Audit yang dilakukan oleh auditor diharapkan dapat mengurangi atau memperbaiki kesalahan serta penyimpangan yang telah terjadi.

Pada Penelitian ini, kualitas audit digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian mengenai kualitas audit telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Variabel kualitas audit ini akan diukur dengan kuesioner (Anjani, 2019).

2.5 Kompetensi Auditor

2.5.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Christiawan (2002) kompetensi auditor yang dimaksud adalah kemampuan Pendidikan dan pengalaman yang cukup sebagai auditor dalam bidang audit dan akuntansi. Kompetensi auditor merupakan sifat dan kemampuan auditor, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas jabatannya dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014). Auditor harus memiliki kompetensi dalam pendidikan formal di bidang audit dan akuntansi, serta pengalaman kerja yang memadai sesuai dengan profesi seorang auditor serta keterlibatan dalam pendidikan profesional yang berkelanjutan dalam (Fahdi, 2018).

Auditor dapat memperoleh kompetensi melalui Pendidikan formal di perguruan tinggi, khususnya dibidang akuntansi, serta melalui keikutsertaan dalam program pelatihan dan pengembangan profesional yang diselenggarakan oleh lembaga tempat kerjanya

2.5.2 Indikator Kompetensi Auditor

Menurut Effendy (2010) kompetensi auditor dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Penguasaan standar akuntansi dan auditing

Pendidikan formal memberikan wawasan yang berharga bagi auditor dalam menjalankan proses audit. Wawasan ini memungkinkan auditor untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar akuntansi dan auditing yang berlaku.

2. Wawasan Tentang Pemerintahan

Auditor dianggap kompeten dan berpengalaman dalam melaksanakan audit jika memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek pemerintahan, termasuk struktur organisasi, fungsi, program, dan kegiatan yang terkait.

3. Peningkatan Keahlian

Semakin lama pengalaman kerja dan keahlian dalam bidang audit, semakin berkembang pula kompetensi seorang auditor. Selain itu, keterampilan audit dapat ditingkatkan melalui pelatihan akuntansi dan audit yang diselenggarakan baik oleh inspektorat maupun lembaga eksternal.

2.6 Komitmen Organisasi

2.6.1 Pengertian Komitmen Organisasi

Menurut Robbins & Judge (2009) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai berikut:

“komitmen organisasi (*organizational commitment*) merupakan tingkat dimana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi tertentu beserta tujuannya dan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya didalam organisasi tersebut”.

Komitmen organisasi merujuk pada sejauh mana individu merasa terikat dan ingin terus menjadi bagian dari organisasi tersebut, yang dapat terlihat melalui kesediaannya dalam memberikan kontribusi terbaik dari dirinya. Komitmen organisasi merupakan suatu kondisi psikologis yang mencerminkan keterikatan antara karyawan dan organisasi, yang turut memengaruhi keputusan individu untuk bertahan atau keluar dari organisasi tersebut. Individu dengan tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan cenderung mengutamakan kepentingan organisasi tersebut di atas kepentingan pribadinya sendiri dan selalu berupaya mendorong untuk kemajuan organisasi secara optimal.

2.6.2 Indikator Komitmen Organisasi

Menurut Meyer et al., (2004) indikator sebagai pengukuran komitmen organisasi sebagai berikut:

1. Komitmen Afektif

Yaitu rasa emosional pada organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilai.

2. Komitmen Berkelanjutan

Yaitu dimana nilai yang dirasa dari bertahan pada organisasi tersebut bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.

3. Komitmen Normatif

Yaitu kewajiban untuk bertahan pada organisasi untuk alasan moral serta sopan.

2.7 Akuntabilitas

2.7.1 Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability*, yang berarti suatu kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akuntabilitas mencerminkan keadaan di mana seseorang atau suatu entitas bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Menurut Br Purba et al., (2018) secara umum akuntabilitas berkaitan dengan penyampaian informasi dan pengungkapan *disclosure* mengenai aktivitas serta kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Mardiasmo (2005) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut.

“akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban”.

2.7.2 Indikator Akuntabilitas

Feny et al., (2012) menyatakan bahwa terdapat 2 indikator akuntabilitas individu seorang auditor dan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Motivasi

Indikator ini merujuk pada dorongan internal auditor untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Motivasi di sini bukan hanya sekadar menyelesaikan pekerjaan, melainkan adanya keinginan kuat untuk mencapai kualitas audit yang tinggi dan mematuhi standar profesi. Auditor yang memiliki motivasi tinggi akan lebih proaktif, teliti, dan berdedikasi dalam setiap tahapan audit. Mereka termotivasi oleh keinginan untuk memberikan nilai tambah, menjaga reputasi profesional, serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan dapat dipercaya. Seorang auditor yang termotivasi akan secara sukarela mencari informasi tambahan,

melakukan verifikasi lebih mendalam, dan memastikan semua temuan didukung oleh bukti yang kuat, bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung.

2. Kewajiban sosial

Indikator ini mencerminkan kesadaran auditor terhadap tanggung jawabnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, tidak hanya kepada atasan. Kewajiban sosial mendorong auditor untuk bertindak secara etis, objektif, dan independen demi kepentingan publik. Ini termasuk memastikan bahwa laporan audit mencerminkan kondisi sebenarnya, tidak memihak, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi, pemerintah dan masyarakat. Aspek ini menekankan peran auditor sebagai penjaga kepentingan publik. Auditor yang memiliki kesadaran kewajiban sosial yang tinggi tidak akan tunduk pada tekanan untuk memanipulasi data atau menyembunyikan fakta, meskipun hal itu mungkin menguntungkan klien. Mereka akan mengedepankan integritas dan transparansi demi akuntabilitas laporan.

Kedua indikator ini menunjukkan bahwa seorang auditor yang akuntabel tidak hanya didorong oleh keinginan internal untuk berhasil (motivasi), tetapi juga memiliki kesadaran dan komitmen terhadap tanggung jawab sosialnya sebagai seorang profesional yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan profesi.

2.8 Kerangka Konseptual

2.8.1 Teori Agensi

Menurut Scott (2005) teori agensi merupakan sebuah kerangka kerja yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik atau investor) dan agen (manajer) dalam sebuah organisasi. Teori ini berfokus pada potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara kedua belah pihak dan bagaimana konflik tersebut dapat dikelola melalui desain kontrak dan sistem insentif yang tepat. Teori agensi merupakan prinsip untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan dalam hubungan antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan ini muncul jika terjadi

pemisahan antara *principal* dan *agent* yang memiliki kepentingan masing – masing. Perbedaan tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan di mana *principal* merupakan pihak yang berkewajiban untuk memberikan upah atas jasa *agent* untuk memaksimalkan keuntungannya dan *principal* berhak mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh *agent*. Faktanya, *agent* mempunyai informasi internal yang jauh lebih luas daripada *principal*. Maka dari itu, seorang *principal* berhak untuk meminta laporan keuangan yang dibuat oleh *agent* untuk mengetahui kinerjanya sesuai dengan tujuan.

Menurut Erawan & Sukartha (2018), auditor sebagai pihak ketiga yang akan membantu mengatasi konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Hubungan penelitian ini dengan teori agensi untuk menjelaskan mengenai masyarakat sebagai *principal* sedangkan pemerintah daerah *agent* dan auditor pada inspektorat daerah berperan sebagai penengah antara (*principal*) dan (*agent*). Hal tersebut disebabkan *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola seluruh sumber daya, kemudian *principal* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas ketika mengelola sumber daya tersebut.

Dengan demikian peran auditor inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan terkait pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya berupa audit yang berkualitas. Teori keagenan memiliki hubungan berupa permintaan *principal* dalam menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggungjawab, dalam memenuhi permintaan tersebut (*agent*) mempengaruhi auditor ketika melakukan tugasnya dalam meningkatkan audit yang berkualitas pada lingkungan pemerintahan sesuai dengan kepentingannya sehingga

pertanggungjawaban diragukan. Hal tersebut dikarenakan (agent) memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan *principal* untuk mempengaruhi kinerja auditor.

2.8.2. Teori Atribusi

Teori atribusi, yang pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) dan kemudian diperluas oleh Kelley (1973) serta dilengkapi oleh Weiner (1985) dengan dimensi stabilitas dan kendali, merupakan kerangka kerja fundamental dalam psikologi sosial untuk memahami bagaimana individu menafsirkan dan mencari penyebab dari suatu perilaku, baik perilaku dirinya sendiri maupun orang lain. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang mengamati suatu hasil atau perilaku, ia secara alami akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasarinya. Secara garis besar, atribusi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama: atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kemampuan, usaha, motivasi, komitmen pribadi, atau tanggung jawab personal yang melekat pada individu tersebut. Sebaliknya, atribusi eksternal berkaitan dengan faktor-faktor di luar kendali individu, misalnya tekanan lingkungan kerja, kebijakan atau prosedur organisasi yang berlaku, pengaruh sosial dari rekan kerja atau atasan, hingga ketersediaan sumber daya.

Dalam konteks ini, teori atribusi menjadi sangat relevan dan memberikan sudut pandang yang kuat untuk memahami fenomena kualitas audit. Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor pada dasarnya adalah hasil dari proses aktivitas dan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kualitas ini diatribusikan atau dijelaskan penyebabnya. Penelitian ini secara spesifik menguji tiga variabel independen yang dapat diidentifikasi sebagai

penyebab kualitas audit, yaitu kompetensi auditor, komitmen organisasi, dan akuntabilitas.

Kompetensi auditor secara nyata merupakan contoh dari atribusi internal. Ketika seorang auditor menghasilkan laporan audit berkualitas tinggi, seseorang akan cenderung mengatribusikan keberhasilan tersebut pada pengetahuan yang mendalam, keterampilan analisis yang tajam, dan pengalaman yang luas yang dimiliki auditor (kemampuan dan usaha internal). Sebaliknya, jika kualitas audit dinilai rendah, atribusi dapat mengarah pada kurangnya kemampuan teknis atau kurangnya usaha auditor dalam mengembangkan diri. Auditor yang memiliki kompetensi tinggi akan cenderung memandang keberhasilan audit sebagai hasil dari usaha dan kemampuannya sendiri, yang memperkuat motivasi dalam dirinya. Di sisi lain, komitmen organisasi lebih condong merepresentasikan atribusi eksternal bagi auditor, meskipun komitmen ini juga dibentuk oleh individu. Komitmen organisasi mengacu pada loyalitas, identifikasi, dan keterlibatan emosional auditor terhadap tujuan dan nilai-nilai Inspektorat. Lingkungan organisasi yang mendukung, dengan manajemen yang berkomitmen terhadap kualitas, akan memberikan sumber daya yang memadai, sistem kontrol internal yang kuat, dan budaya kerja yang kondusif. Jika kualitas audit meningkat, hal ini bisa diatribusikan pada kuatnya dukungan dan komitmen yang diberikan oleh Inspektorat, yang memfasilitasi auditor untuk bekerja secara optimal. Auditor mungkin mengatribusikan kesuksesan audit pada sistem organisasi yang baik atau dukungan dari atasan (faktor eksternal yang positif). Auditor kemungkinan akan merasa keberhasilan audit berasal dari sistem organisasi yang baik atau dukungan atasan, yang merupakan faktor positif dari luar diri mereka. Sementara itu, akuntabilitas memiliki dimensi yang menarik

karena bisa diatribusikan secara internal maupun eksternal. Secara internal, akuntabilitas merujuk pada tingkat tanggung jawab pribadi dan integritas yang dirasakan oleh seorang auditor terhadap tugasnya. Auditor yang memiliki kesadaran akuntabilitas tinggi secara intrinsik akan berusaha keras untuk memastikan setiap tahapan audit dilakukan dengan cermat dan sesuai standar. Namun, akuntabilitas juga memiliki dimensi eksternal yang kuat, yaitu melalui mekanisme akuntabilitas yang diterapkan oleh organisasi. Ini termasuk sistem pelaporan yang jelas, konsekuensi atas ketidakpatuhan, atau standar kinerja yang ditetapkan oleh Inspektorat. Jika kualitas audit tinggi, bisa diatribusikan pada komitmen pribadi auditor terhadap tanggung jawab (internal) atau pada sistem pengawasan dan penegakan akuntabilitas yang efektif oleh Inspektorat (eksternal).

Dengan demikian, teori atribusi menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena membantu memahami bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor pada Inspektorat Kota Yogyakarta dan Inspektorat DIY bukan semata-mata dipengaruhi oleh sistem atau prosedur organisasi semata. Kualitas audit juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal dan persepsi internal auditor terhadap peran dan tanggung jawabnya. Pengaruh dari atribusi internal seperti bagaimana auditor memandang kompetensinya sebagai penyebab keberhasilan, atau bagaimana ia secara pribadi bertanggung jawab atas akuntabilitas berperan penting dalam menentukan integritas proses audit dan keandalan hasilnya. Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal ini diatribusikan terhadap kualitas audit akan berdampak pada penguatan fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah,

memungkinkan perumusan strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja auditor dan lembaga pengawas.

2.8.3. Hubungan Kompetensi Auditor dengan Kualitas Audit

Menurut Christiawan (2002) kompetensi auditor yang dimaksud adalah kemampuan pendidikan dan pengalaman yang cukup sebagai auditor dalam bidang audit dan akuntansi. Berdasarkan pada definisi diatas dapat disimpulkan bahwa auditor yang kompeten mampu memahami dan menerapkan prosedur audit yang sesuai, serta mengidentifikasi potensi risiko audit secara akurat. Kompetensi auditor ini menjadi dasar bagi auditor dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif, sehingga dapat menghasilkan opini audit yang dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan, terutama pihak prinsipal. Dengan demikian, kualitas audit yang baik sangat bergantung pada kompetensi auditor, karena auditor yang kompeten dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, yang akan mengurangi potensi penyalahgunaan informasi oleh agen, serta memberikan jaminan yang lebih besar kepada principal mengenai kebenaran laporan keuangan yang diaudit.

2.8.4. Hubungan Komitmen Organisasi dengan Kualitas Audit

Menurut Robbins & Judge (2009) komitmen organisasi (*organizational commit-*

ment) merupakan tingkat dimana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi tertentu beserta tujuannya dan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya didalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi yang tinggi menunjukkan adanya keselarasan nilai dan identifikasi karyawan terhadap organisasi tempat ia bekerja. Dalam praktik audit, auditor yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan cenderung menunjukkan loyalitas, integritas, dan motivasi dalam menjalankan tugas audit secara profesional dan objektif. Mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga reputasi organisasi audit dan berupaya menghasilkan audit yang berkualitas, sesuai dengan standar dan etika profesi. Auditor yang memiliki rasa memiliki terhadap organisasi akan lebih disiplin, akurat, dan teliti dalam menjalankan prosedur audit, sehingga mampu menghasilkan laporan audit yang andal dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan.

2.8.5. Hubungan Akuntabilitas dengan Kualitas Audit

Menurut Mardiasmo (2005) akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks audit, auditor bertindak sebagai pihak yang diberikan amanah oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh entitas yang diaudit.

Tingginya tingkat akuntabilitas seorang auditor mencerminkan komitmen untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tahapan audit, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, hingga penyusunan opini audit. Hal ini akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas audit karena proses audit dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membentuk kualitas audit yang baik. Semakin tinggi akuntabilitas auditor, maka semakin besar pula kemungkinan auditor untuk menghasilkan audit yang berkualitas tinggi, yang tidak hanya dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah banyak melakukan penelitian tentang kualitas audit, tidak terkecuali di sektor pemerintahan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi. Penelitian Terdahulu memiliki variabel dependen yang sama yaitu “kualitas audit”.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Makatita (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi, Independensi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Audit Internal Inspektorat Kabupaten Mimika”. Penelitian kedua Sadewa (2024) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat (Studi Empiris pada Auditor Internal Inspektorat Karesidenan Surakarta)”. Penelitian ketiga Hutasoit (2021) dengan

judul “Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman Kerja Audit, Akuntabilitas, dan Profesionalisme terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal” (Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara) .

Penelitian keempat Candra (2022) dengan judul “Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris pada Auditor Internal Inspektorat Kabupaten Klaten). Penelitian kelima yang dilakukan oleh Hilman (2021) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Skeptisme Profesional, Kompetensi Auditor dan E-Audit Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar”. Penelitian keenam Soenjaya (2024) Dengan Judul “Pengaruh Independensi, Skeptisme, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ketujuh Ridwan et al., (2023) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit” (Studi Kasus Inspektorat Kota Jambi).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	PENULIS	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1	(Makatita, 2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi, Independensi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Audit Internal Inspektorat Kabupaten Mimika	1. Akuntabilitas 2. Kompetensi 3. Independensi 4. Komitmen Organisasi	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, kompetensi, independensi dan komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2	(Sadewa, 2024)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat (Studi Empiris pada Auditor Internal Inspektorat Karesidenan Surakarta)	1. Kompetensi 2. Independensi 3. Integritas	1. Kompetensi, Independensi, Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada auditor internal Inspektorat di Karesidenan Surakarta.
3	(Nurraza Hermauli Hutasoit, 2021)	Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman Kerja Audit, Akuntabilitas, dan Profesionalisme terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Pada Kantor	1. Pengaruh pengetahuan 2. Pengalaman kerja audit 3. Akuntabilitas 4. Profesionalisme	1. Pengetahuan, Pengalaman, Akuntabilitas, dan Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal pada

		Inspektorat Provinsi Sumatera Utara)		Kantor Inspektorat Provinsi Sumatra Utara.
4	(Candra, 2022)	Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit (Studi	1. Independensi 2. Akuntabilitas 3. Objektivitas	1.Independensi,Aku ntabilitas, dan Objektivitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

		Empiris pada Auditor Internal Inspektorat Kabupaten Klaten)		pada Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Klaten.
--	--	---	--	--





5	(Nurfadhil ah Hilman, 2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Skeptisme Profesional, Kompetensi Auditor dan E-Audit Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar	1. Akuntabilitas 2. Skeptisme Profesional 3. Kompetensi Auditor 4. E-Audit	1. Akuntabilitas, Skeptisme Profesional, Kompetensi Auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
6	(Soenjaya, 2024)	Pengaruh Independensi, Skeptisme, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi	1. Independensi 2. Skeptisme 3. Kompetensi Auditor	1. Independensi,Sk eptisme, dan Kompetensi Auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit

7	(Ridwan et al., 2023)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Inspektorat Kota Jambi)	1. Kompetensi 2. Independensi 3. Profesionalisme	1. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2. Independensi, Profesionalisme memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit
---	-----------------------	---	--	---

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Kompetensi auditor merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014) kompetensi auditor merupakan sifat dan kemampuan auditor, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas jabatannya. Dalam konteks audit, kompetensi auditor mencerminkan kapasitas profesional auditor dalam memahami standar audit, menerapkan metode dan teknik audit, serta menilai risiko dan menginterpretasikan temuan secara tepat.

Auditor yang kompeten akan mampu melaksanakan proses audit secara sistematis dan objektif, sehingga hasil audit yang diperoleh pun memiliki tingkat keandalan dan relevansi yang tinggi. Jika auditor mampu memanfaatkan dan menerapkan pengetahuannya secara tepat dan benar, maka mutu audit yang dihasilkan juga akan semakin optimal.

Semakin tinggi tingkat kompetensi auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan pun akan meningkat. Apabila auditor mempunyai tingkat kompetensi yang baik maka auditor akan lebih mudah untuk melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya apabila tingkat kompetensinya rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan kesulitan yang menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan akan rendah juga (Harianti, 2019).

Dengan demikian, kompetensi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki keterampilan teknis, pengetahuan yang memadai, serta sikap profesional yang baik, akan lebih mampu menghasilkan audit yang sesuai dengan standar profesional dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kompetensi auditor menjadi salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan kualitas audit,

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hilman (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sadewa (2024) menunjukkan hasil bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori yang ada dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu maka, dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit

2.10.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Robbins & Judge (2009) komitmen organisasi (*organizational commitment*) merupakan tingkat dimana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya

dengan organisasi tertentu beserta tujuannya dan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya didalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi diartikan sebagai loyalitas karyawan terhadap perusahaan, yang tercermin dalam dedikasi, kepedulian, serta keinginan untuk terus mendorong kemajuan (Luthans, 2006). Komitmen organisasi terbentuk berdasarkan kepercayaan karyawan terhadap nilai-nilai organisasi, kesediaan mereka untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi, serta loyalitas untuk tetap menjadi bagian dari organisasi.

Komitmen terhadap organisasi akan terbentuk ketika seseorang menyadari hak dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas di lingkungan organisasi, tanpa mengutamakan kepentingan pribadinya (Suryana, 2013). Komitmen organisasi merupakan suatu kondisi psikologis yang mencerminkan keterikatan antara karyawan dan organisasi, yang turut memengaruhi keputusan individu untuk bertahan atau keluar dari organisasi tersebut. Individu dengan tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan cenderung mengutamakan kepentingan organisasi tersebut di atas kepentingan pribadinya sendiri dan selalu berupaya mendorong untuk kemajuan organisasi secara optimal.

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Makatita (2020) menyatakan terdapat pengaruh positif antara komitmen organisasi terhadap kualitas audit. Auditor dengan komitmen organisasi yang baik akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya sehingga menghasilkan kualitas audit yang dihasilkan juga semakin baik. Maka dari itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit

2.10.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Menurut Br Purba et al., (2018) secara umum akuntabilitas berkaitan dengan penyampaian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas serta kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya, auditor yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi akan berupaya memberikan informasi yang transparan, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pengguna laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan audit, transparansi ini tercermin dalam proses audit yang objektif dan hasil audit yang disusun secara independen berdasarkan bukti yang sah. Sementara itu Mardiasmo (2005) menekankan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.

Dalam konteks ini, auditor dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, karena auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada entitas yang diaudit, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya yang menggunakan hasil audit sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntabilitas mendorong auditor untuk bekerja secara profesional dengan berpedoman pada prinsip dan standar audit yang berlaku, sehingga semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dimiliki auditor, semakin besar pula kemampuannya dalam melaksanakan audit secara menyeluruh dan menghasilkan laporan serta opini audit yang andal dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari laporan keuangan..

Oleh karena itu, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, karena menjadi landasan moral dan profesional bagi auditor dalam menjalankan fungsinya secara objektif, transparan, dan dapat dipercaya.

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2022) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hilman (2021) menunjukkan hasil bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Auditor dengan akuntabilitas yang tinggi akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya sehingga menghasilkan kualitas audit yang dihasilkan juga semakin baik. Maka dari itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit